



Katalog BPS : 3102019.62

# ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA KALIMANTAN TENGAH 2004-2013



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
*BPS - Statistics of Kalimantan Tengah Province*



**ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA  
KALIMANTAN TENGAH  
2004-2013**

<http://kalteq.bps.go.id>

# **ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA KALIMANTAN TENGAH 2004-2013**

Nomor Publikasi : 62550.1408

Katalog BPS : 3102019.62

Ukuran Buku : 15 x 21 cm

Jumlah Halaman : x + 74 halaman

Naskah :

Penanggung Jawab Umum : Sukardi

Koordinator : Maria Wahyu Utami

Anggota : Anik Aida Fatma Maslikhatin  
Lorie Lina

Gambar Kulit dan Tata Letak :

Koordinator : Bob Setiabudi

Tata Letak : Ervin Prasetyaning Astuti

Gambar Kulit : Nano Yulian Pratama

Diterbitkan Oleh :

BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

## KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia merupakan proses perubahan kualitas manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Sebagai indikator kinerja pembangunan, pembangunan manusia disusun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Semua dimensi pembangunan manusia tersebut terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

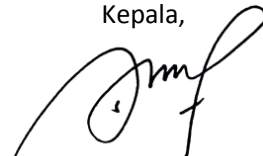
Publikasi “Analisis Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah 2004-2013” menyajikan informasi mengenai gambaran sosial ekonomi dan pembangunan manusia Kalimantan Tengah. Pembangunan manusia yang diuraikan dalam publikasi ini sisi pencapaian, posisi maupun disparitas antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu maupun memberikan saran dan masukan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data.

Palangka Raya, Desember 2014

BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala,



**Dr. Ir. Sukardi, M.Si**



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Pendahuluan.....	1
1.1    Latar Belakang.....	3
1.2    Sistematika Penulisan .....	6
Metodologi Penghitungan IPM .....	7
2.1    Pengertian Indeks Pembangunan Manusia.....	9
2.2    Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	12
2.3    Sumber Data .....	17
2.4    Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia.....	17
Pencapaian Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah .....	21
3.1    Sekilas Provinsi Kalimantan Tengah .....	23
3.2    Capaian Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah.....	27
3.3    Perkembangan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian.....	33
3.4    Capaian Pembangunan Manusia Tingkat Kabupaten/Kota .....	42
Disparitas Pencapaian Pembangunan Antarwilayah .....	47
4.1    Disparitas IPM Antarkabupaten/kota.....	49
4.2    Disparitas Komponen Penyusun IPM Antarkabupaten/Kota.....	51
Kesimpulan .....	59
Daftar Pustaka .....	63
Lampiran .....	65





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Kualitas Rumah .....	15
Tabel 2.2	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM.....	18
Tabel 3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Peringkat Menurut Kabupaten/kota, 2004, 2007, 2010, dan 2013.....	43

<http://kalteng.bps.go.id>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Diagram Penghitungan IPM .....	11
Gambar 3.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Wilayah Kalimantan (dalam triliun rupiah), 2004-2013 .....	25
Gambar 3.2.	Laju Pertumbuhan Perekonomian di Wilayah Kalimantan Tengah (dalam persen), 2004-2013.....	27
Gambar 3.3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Peringkat IPM Kalimantan Tengah, 2004-2013.....	28
Gambar 3.4.	Reduksi Shortfall Kalimantan Tengah, 2004-2007, 2007-2010, dan 2010-2013.....	29
Gambar 3.5.	Angka Harapan Hidup Kalimantan Tengah, 2011-2013.....	30
Gambar 3.6.	Angka Melek Huruf Kalimantan Tengah, 2004 - 2013.....	31
Gambar 3.7.	Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Tengah, 2004-2013 .....	32
Gambar 3.8.	Pengeluaran perkapita per Tahun Disesuaikan (PPP) Kalimantan Tengah (dalam ribu rupiah), 2004-2013.....	33
Gambar 3.9.	Angka Partisipasi Sekolah Kalimantan Tengah, 2005-2013 .....	34
Gambar 3.10.	Penduduk Kalimantan Tengah menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki (dalam persen), 2013 .....	35
Gambar 3.12.	Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Tengah, 2004-2013 .....	40
Gambar 3.13.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Tengah, 2007-2013.....	42
Gambar 3.14.	Rata-rata Reduksi Shortfall Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2004 – 2013.....	45
Gambar 4.1.	IPM Terendah dan Tertinggi yang Dicapai Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2004-2013 .....	49
Gambar 4.2.	Disparitas Reduksi Shortfall Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2004-2013 .....	51

Gambar 4.3.	Disparitas Angka Harapan Hidup Antarkabupaten di Kalimantan Tengah, 2004, 2017, 2010 dan 2013.....	53
Gambar 4.4.	Disparitas Rata-rata Lama Sekolah Antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah, 2004-2013.....	55
Gambar 4.5.	Disparitas Angka Melek Huruf (AMH) Antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah, 2004-2013.....	56
Gambar 4.6	Disparitas Pengeluaran Perkapita Antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah, 2004-2013.....	57

<http://kalteng.bps.go.id>

# PENDAHULUAN

 *Latar Belakang*

 *Sistematika Penulisan*

<http://kalteng.bps.go.id>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, *Human Development Report* 2000). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan alat dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat dapat diatasi.

Ukuran pembangunan manusia yang tersedia pun beragam, namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat membandingkan antarwilayah. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*).

Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP adalah proses perluasan pilihan-pilihan penduduk. Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu :

panjang umur dan sehat, berpendidikan dan standar hidup yang layak. Pilihan lainnya dianggap mendukung tiga pilihan diatas.

Sebelum tahun 1970-an, keberhasilan pembangunan hanya diukur dari tingkat pertumbuhan *gross domestic product/gross national product* (GDP/GNP), baik secara keseluruhan maupun perkapita. Namun faktanya menunjukkan banyak negara-negara dunia ketiga yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup penduduknya. Sehingga para pakar kemudian merumuskan sebuah konsep baru dalam mengukur pembangunan suatu daerah yang berorientasi pada pembangunan manusia.

Konsep ini mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Sehingga bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas manusianya.

UNDP telah memperkenalkan IPM pada tahun 1990 dan dipublikasikan dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan sebagai pengklasifikasian apakah sebuah negara maju, negara berkembang, atau negara



terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM mengukur pencapaian rata-rata suatu wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan sehat (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living standard*). Ketiga dimensi tersebut dianggap dapat menangkap dengan baik pembangunan manusia.

Secara umum, perkembangan IPM di Indonesia terus mengalami peningkatan. Perkembangan IPM menunjukkan peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian. Demikian pula pembangunan manusia di masing-masing provinsi termasuk Kalimantan Tengah. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah “Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat”. Secara keseluruhan pembangunan yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan

kualitas manusia. Indikator untuk melihat pencapaian kualitas manusia dapat dilihat melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## 1.2 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama menyajikan latar belakang penulisan. Bab ini menguraikan pentingnya IPM sebagai indikator untuk melihat kemajuan dalam pembangunan manusia. Metodologi penghitungan IPM diuraikan dalam bab kedua. Selanjutnya pada bab ketiga akan dibahas pencapaian Kalimantan Tengah dalam pembangunan manusianya selama sepuluh tahun terakhir. Kemudian pada bab keempat disajikan disparitas IPM dan komponen penyusun IPM antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Bab terakhir merupakan rangkuman dari keempat bab sebelumnya.

# **M**ETODOLOGI PENGHITUNGAN IPM

 *Pengertian Indeks Pembangunan Manusia*

 *Komponen Indeks Pembangunan Manusia*

 *Sumber Data*

 *Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia*



## **BAB II**

### **METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM**

#### **2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

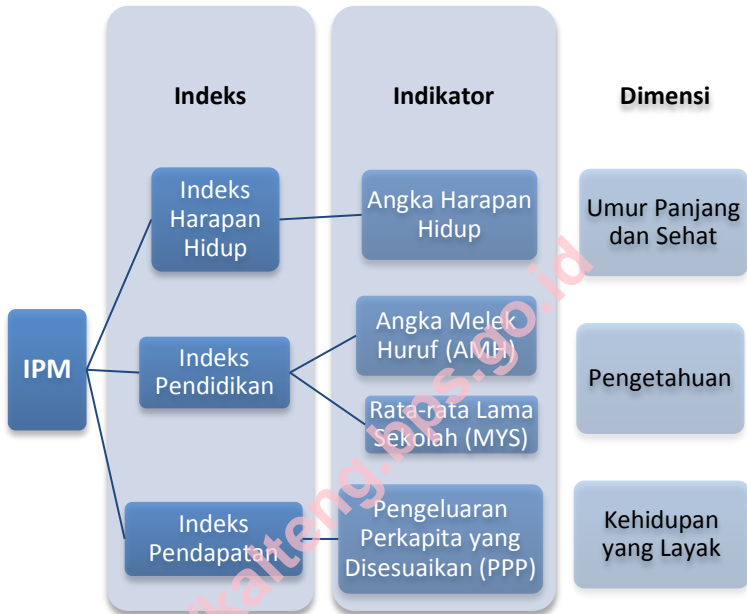
Pembangunan manusia bertitik tolak pada pemahaman bahwa pembangunan manusia harus dapat memperluas pilihan. Lazimnya setiap manusia mempunyai banyak keinginan. Meskipun demikian, terdapat beberapa keinginan yang sangat mendasar. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan tersebut. Fokus pada manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia.

Menurut konsep ini pembangunan manusia harus seimbang, antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan. Proses pembangunan setidaknya harus menciptakan lingkungan untuk manusia dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal dan mempunyai cukup kesempatan (memanfaatkan kemampuannya) untuk dapat hidup produktif dan kreatif sesuai kebutuhan dan minatnya. Dua sisi pembangunan tersebut harus berkembang secara seimbang.

Konsep pembangunan seperti diuraikan diatas nampaknya sederhana. Meskipun memang begitu seharusnya. Namun konsep mendasar tersebut seringkali dilupakan. Misalnya dalam paradigma pembangunan ekonomi tujuan pembangunan disederhanakan menjadi pertumbuhan ekonomi/peningkatan pendapatan perkapita saja. Pendapatan tersebut dianggap sudah mewakili dengan baik pilihan-pilihan lainnya.

Selama setengah abad terakhir, konsep pembangunan manusia yang diuraikan diatas berbeda dengan konsep pembangunan yang selama ini berkembang. Fokus yang berkembang selama ini lebih pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan manusia, kebutuhan dasar manusia, dan pembangunan sumber daya manusia. Sementara itu, pendekatan pembangunan manusia justru mencakup keseluruhan aspek tersebut. Pembangunan manusia mencakup berbagai segi dan kompleksitas kehidupan manusia.

Seperti halnya pendekatan pembangunan ekonomi, konsep pembangunan manusia ini juga terukur. Berdasarkan konsep pembangunan yang telah diuraikan, pembangunan manusia diukur melalui indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Gambar 2.1. Diagram Penghitungan IPM**

Capaian pembangunan manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini disusun berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ketiga dimensi tersebut, yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat sebagai capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak (Gambar 2.1). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena memiliki banyak faktor. Untuk mengukur dimensi

kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

## 2.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

### Dimensi Umur Panjang dan Sehat

Umur panjang dan sehat dapat diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Data yang dibutuhkan dalam perhitungan Angka Harapan Hidup adalah data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Untuk menghitung angka harapan hidup tersebut digunakan paket program Mortpack dengan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP. Batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

### Tingkat Pengetahuan

Dimensi pengetahuan penduduk diukur dengan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*) dan



angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pada proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga.

Dalam penghitungannya, dua batasan yang dipakai sesuai kesepatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0. Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

### **Standar Hidup Layak**

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita riil yang disesuaikan (*adjusted real GDRP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak.

Untuk keperluan penghitungan provinsi atau kabupaten/kota, data dasar PDRB perkapita riil yang telah disesuaikan tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Data dasar tersebut kurang peka untuk mengukur pergerakan daya beli penduduk yang merupakan fokus dalam IPM. Sehingga sebagai penggantinya dalam menghitung standar hidup layak digunakan rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan dengan formula *Atkinson*.

$$C(I) = C_{(i)}$$

$$= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2}$$

$$= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{1/3}$$

Jika  $C_{(i)} < Z$   
 Jika  $Z < C_{(i)} < 2Z$   
 Jika  $2Z < C_{(i)} < 3Z$   
 dan seterusnya

dimana

$C(i)$  = PPP dari nilai riil pengeluaran perkapita

$Z$  = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 549.500,- perkapita per tahun atau Rp. 1.500,- perkapita per hari

Penghitungan indikator konsumsi riil perkapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

- ◆ Menghitung pengeluaran konsumsi perkapita dari Susenas Modul (=A) .
- ◆ Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota propinsi yang sesuai (=B).
- ◆ Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan

*International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.

Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul (Tabel 2.1).

- ◆ Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
- ◆ Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

$$\text{PPP/unit} = \frac{\sum_{j=1}^n E_{(i,j)}}{\sum_{j=1}^n P_{(9,j)} q_{(i,j)}}$$

Dimana:

$E_{(i,j)}$  : pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke-i

$P_{(9,j)}$  : harga komoditi j di DKI Jakarta

$q_{(i,j)}$  : jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di propinsi ke-i

**Tabel 2.1 Klasifikasi Kualitas Rumah**

Komponen	Kualitas		Skor	
	A	B	A	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lantai	Keramik marmer atau granit	Lainnya	1	0
Luas lantai perkapita	$\geq 10 \text{ m}^2$	Lainnya	1	0
Dinding	Tembok	Lainnya	1	0
Atap	Kayu/sirap, beton	Lainnya	1	0
Fasilitas penerangan	Listrik	Lainnya	1	0
Fasilitas air minum	Leding	Lainnya	1	0
Jamban	Milik sendiri	Lainnya	1	0

Catatan : Skor awal untuk setiap rumah = 1

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas Kor. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor seperti yang tertera dalam Tabel 2.1.

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah  $6/8$  atau 0,75 unit.

Perlu dicatat bahwa sewa rumah, bensin dan air minum merupakan komoditi baru dalam penghitungan PPP/unit. Ketiga komoditi tersebut tidak diperhitungkan dalam penghitungan PPP/unit sebagaimana disajikan dalam publikasi BPS sebelumnya (1996). Karena perbedaan ini maka IPM dalam publikasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan IPM dalam publikasi ini.

Perhitungan indeks daya beli (PPP) dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 8 (lampiran). Batas maksimum dan minimum penghitungan daya beli digunakan seperti yang tertera dalam Tabel 2.2. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp.732.720. sementara sampai dengan tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp.300.000. Pada tahun 1996 dengan mengikuti kondisi pasca krisis ekonomi batas

minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp.360.000.

### 2.3 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor, Susenas Modul Konsumsi. Selain itu digunakan juga data penunjang seperti data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Proyeksi Penduduk (Sensus Penduduk/SP2000), dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Sementara Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung menggunakan data Susenas yang dikoreksi dengan data Supas dan Proyeksi Penduduk. Sedangkan indikator daya beli atau PPP (*Purchasing Power Parity*) dihitung dengan menggunakan data Susenas modul Konsumsi yang didasari pada 27 komoditi (lihat Lampiran 8). Untuk mendapatkan pengeluaran perkapita riil digunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai deflator.

### 2.4 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam penghitungan IPM, setiap komponen terlebih dahulu dihitung indeksnya. Rumus yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{X_{(i,j)} - X_{(i-\min)}}{X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)}} \dots\dots\dots \text{Rumus (1)}$$

$X_{(i,j)}$  = komponen IPM ke-i dari daerah j

$X_{(i-\min)}$  = nilai minimum dari komponen IPM ke-i

$X_{(i-\max)}$  = nilai maksimum dari komponen IPM ke-i

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM**

Komponen IPM	Minimum	Maksimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angka Harapan Hidup	25	85	Standar UNDP
2. Angka melek huruf	0	100	Standar UNDP
3. Rata-rata lama sekolah	0	15	
4. Daya beli	300 000 (1996) 360 000 <sup>b</sup> (1999,2002)	732 720 <sup>a</sup>	Pengeluaran perkapita riil disesuaikan

*Keterangan:*

*a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018*

*b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru*

Setelah dihitung indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan dengan menggunakan rumus (1), maka nilai IPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \text{Indeks } X_{(i,j)} \dots\dots\dots \text{Rumus (2)}$$

Indeks  $X_{(i,j)}$  = indeks komponen IPM ke-i untuk wilayah ke-j

Dari nilai IPM juga dapat dihitung nilai reduksi *shortfall*. Reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (IPM=100). Nilai tersebut merupakan

ukuran kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu. Semakin tinggi nilai reduksi *shortfall*, mengindikasikan bahwa semakin cepat mencapai kondisi ideal. Reduksi *shortfall* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{(t,t+n)} = \left[ \frac{(IPM_{t+n} - IPM_t)}{(IPM_{ideal} - IPM_t)} \times 100 \right]^{1/n} \dots\dots\dots \text{Rumus (3)}$$

- r = reduksi *shortfall*  
 t = tahun  
 n = selisih tahun antar IPM  
 IPM<sub>ideal</sub> = 100


<http://kalteng.bps.go.id>






# **P**ENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA KALIMANTAN TENGAH

 *Sekilas tentang Kalimantan Tengah*

 *Capaian Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah*

 *Perkembangan di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian*

 *Capaian Pembangunan Manusia Tingkat Kabupaten/Kota*



# **BAB III**

## **PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA KALIMANTAN TENGAH**

Pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian para pembuat kebijakan. Pemerintah daerah tidak hanya memfokuskan pada pembangunan ekonomi semata. Keberhasilan pembangunan manusia juga akan diikuti oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

Secara ekonomi, pembangunan Kalimantan Tengah cukup bagus. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diatas pertumbuhan nasional. Kemudian, bagaimana dengan kondisi pembangunan manusia Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

### **3.1 Sekilas Provinsi Kalimantan Tengah**

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Provinsi ini resmi terbentuk pada tahun 1957. Sebelumnya Kalimantan Tengah tergabung dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah merupakan provinsi termuda di Pulau Kalimantan sebelum diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara. Sejak era otonomi daerah, Kalimantan Tengah telah mengalami pemekaran kabupaten. Sampai saat ini Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota.

Secara astronomis Kalimantan Tengah terletak antara  $0^{\circ}45'$  LU dan  $3^{\circ}30'$  LS dan  $110^{\circ}45'$  dan  $115^{\circ}51'$  BT. Bagian utaranya terdiri dari Pegunungan Muller Swachner dan perbukitan, sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dan rawa-rawa. Kalimantan Tengah berbatasan langsung dengan 3 provinsi, yakni

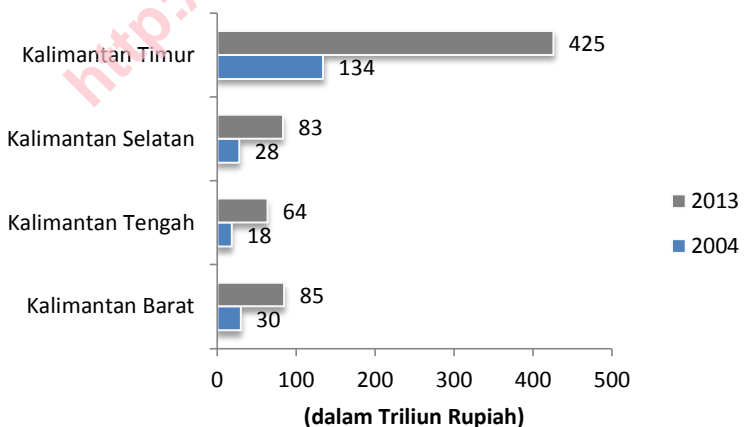
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Wilayahnya beriklim tropis lembab yang dilintasi oleh garis khatulistiwa.

Luas Kalimantan Tengah mencapai sekitar 153 ribu km<sup>2</sup> atau sekitar 8,04 persen dari luas Indonesia. Sebelum Kalimantan Timur mengalami pemekaran menjadi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia. Namun saat ini, Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua. Sebagian besar wilayahnya merupakan hutan dengan vegetasi tropis yang beragam. Orangutan merupakan hewan endemik khas Kalimantan Tengah yang juga merupakan satwa yang dilindungi. Di samping kekayaan alam flora dan fauna tropis, beragam potensi tambang juga terdapat di Kalimantan Tengah, seperti bauksit, biji besi, batubara dan lain-lain.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tahun 2013 penduduk Kalimantan Tengah mencapai sekitar 2.384,7 ribu jiwa dan kepadatan penduduknya mencapai 16 jiwa per km<sup>2</sup>. Dengan luas yang mencapai 8,04 persen dari luas Indonesia, penduduk Kalimantan Tengah hanya sekitar 0,96 persen dari total penduduk Indonesia. Kabupaten Murung Raya memiliki kepadatan penduduk terendah yakni 4 jiwa/km<sup>2</sup> sebesar sementara Kota Palangka Raya memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 102 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dari sisi perekonomian Kalimantan Tengah masih bergantung pada sumber daya alam (*resource base*). Lebih dari seperempat dari PDRB-nya disumbang dari sektor pertanian. Sektor pertanian yang cukup berperan adalah subsektor tanaman perkebunan dan subsektor tanaman pangan. Komoditas tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit merupakan andalannya. Sektor lain yang cukup mendominasi dalam perekonomian Kalimantan Tengah adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Jasa-Jasa. Sementara itu peranan sektor-sektor lainnya relatif kecil, yaitu dibawah 10 persen.

**Gambar 3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Wilayah Kalimantan (dalam triliun rupiah), 2004-2013**

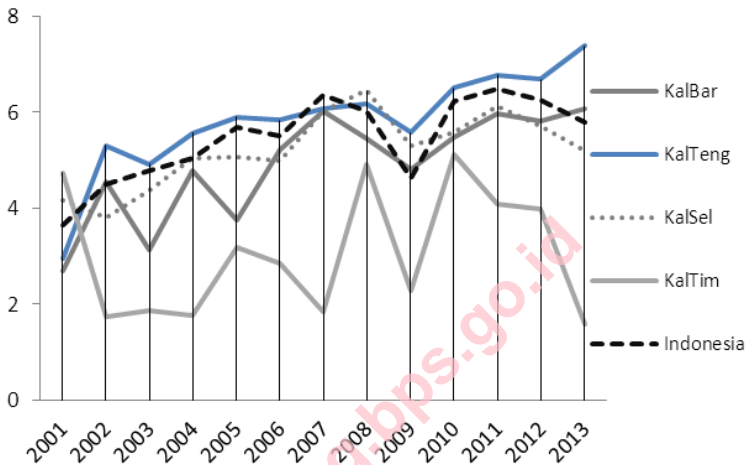


Dengan statusnya, sebagai provinsi termuda di Kalimantan, dari sisi besaran PDRB, PDRB Kalimantan Tengah masih relatif kecil. PDRB Kalimantan Tengah mencapai 18 triliun rupiah pada tahun

2004 dan meningkat menjadi 64 triliun rupiah pada tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di kawasan Kalimantan dapat terlihat bahwa produktivitas ekonomi Kalimantan Tengah masih relatif lebih kecil dibandingkan provinsi lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang diukur melalui PDRB, Kalimantan Tengah perlu mengoptimalkan potensi yang terdapat di Kalimantan Tengah seperti sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi. Kinerja perekonomian Kalimantan Tengah selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Meskipun nilai nominal PDRB Kalimantan Tengah masih jauh dibanding provinsi-provinsi lainnya, namun laju pertumbuhan Kalimantan Tengah terus meningkat semenjak tahun 2001. Tahun 2011, laju perekonomian Kalimantan Tengah masih di bawah laju perekonomian Indonesia maupun provinsi-provinsi lainnya di Kalimantan. Namun perekonomian Kalimantan Tengah beranjak meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini terlihat dari laju perekonomiannya yang cenderung naik.

**Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Perekonomian di Wilayah Kalimantan Tengah (dalam persen), 2004-2013**



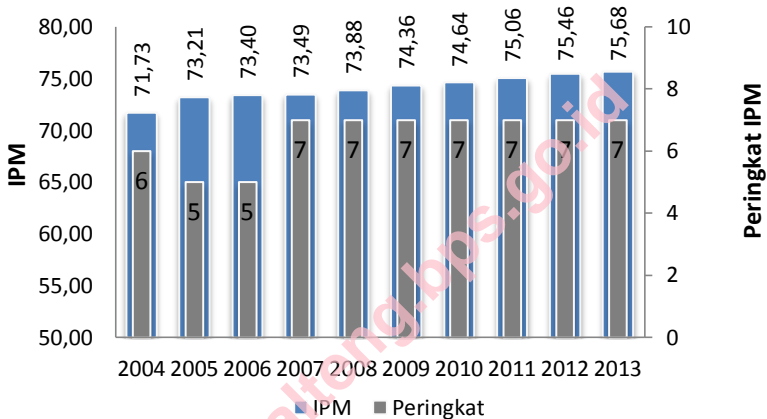
### 3.2 Capaian Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dipandang mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dipandang mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan, terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Selama sepuluh tahun terakhir, IPM Kalimantan Tengah naik sebesar 3,95 poin. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif, yang menandakan

bahwa kualitas manusia di Kalimantan Tengah dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga terus meningkat.

**Gambar 3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Peringkat IPM Kalimantan Tengah, 2004-2013**



UNDP membagi status pembangunan manusia di setiap daerah ke dalam empat kategori. Status pembangunan manusia dengan kategori tinggi ( $IPM \leq 80$ ), kategori menengah atas ( $66 \leq IPM \leq 80$ ), kategori menengah bawah ( $50 \leq IPM \leq 66$ ), dan kategori rendah ( $IPM < 50$ ). Berdasarkan kategori tersebut, Kalimantan Tengah telah mencapai status pembangunan manusia menengah atas. Capaian tersebut relatif stagnan selama sepuluh tahun terakhir. Dari sisi peringkat IPM di level nasional, peringkat IPM Kalimantan Tengah juga relatif stabil selama tujuh tahun terakhir.

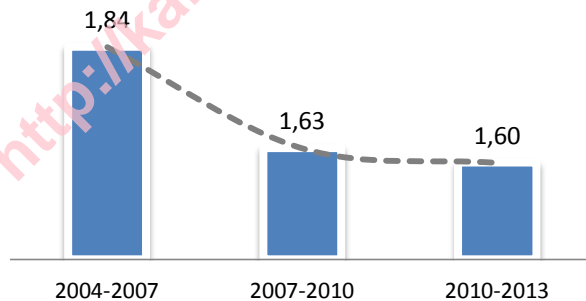
Selain dari capaian angka IPM, keberhasilan pembangunan manusia juga diukur dari reduksi *shortfall*. Reduksi *shortfall* ditujukan untuk melihat kemajuan atau kemunduran dari pencapaian sasaran pembangunan manusia dalam kurun waktu



tertentu. Dengan kata lain, melalui reduksi *shortfall* ini dapat dilihat kecepatan perkembangan IPM suatu daerah.

Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal karena reduksi *shortfall* merupakan gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai posisi idealnya. Posisi ideal IPM yaitu 100. Kecepatan Kalimantan Tengah untuk mencapai IPM ideal selama periode tiga tahunan, yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2013 cenderung menurun. Semakin tinggi IPM yang dicapai oleh suatu daerah, ada kecenderungan nilai reduksi *shortfall*nya pun semakin rendah.

**Gambar 3.4. Reduksi Shortfall Kalimantan Tengah, 2004-2007, 2007-2010, dan 2010-2013**

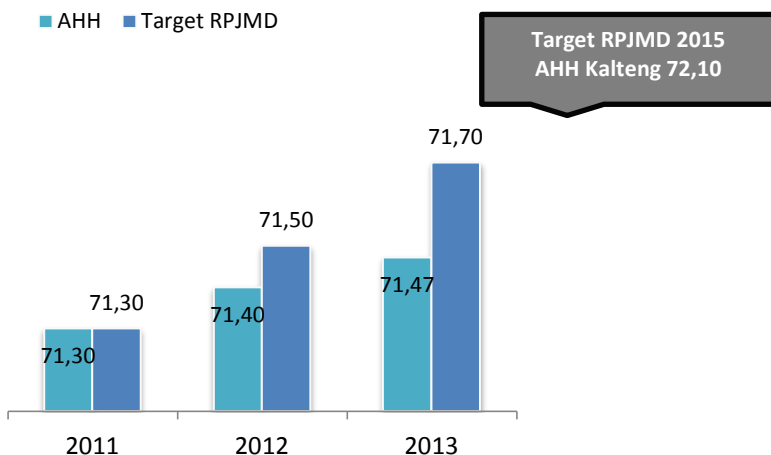


Pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan komponen penyusunannya. Seiring dengan meningkatnya capaian IPM, komponen penyusun IPM juga menunjukkan peningkatan.

Aspek kesehatan diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) cenderung meningkat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Dalam jangka waktu sepuluh tahun, AHH Kalimantan Tengah meningkat sebesar 1,67 tahun dari 69,80 tahun menjadi 71,47 tahun. Peningkatan AHH di Kalimantan mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat secara umum membaik.

Meskipun AHH Kalimantan Tengah telah meningkat, namun pemerintah masih harus berupaya meningkatkan taraf kesehatan manusianya. Capaian AHH pada tahun 2013 masih di bawah target AHH dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015. Untuk mencapai target RPJMD pada tahun 2015 pemerintah harus lebih menggalakkan program-program yang menunjang pembangunan di bidang kesehatan.

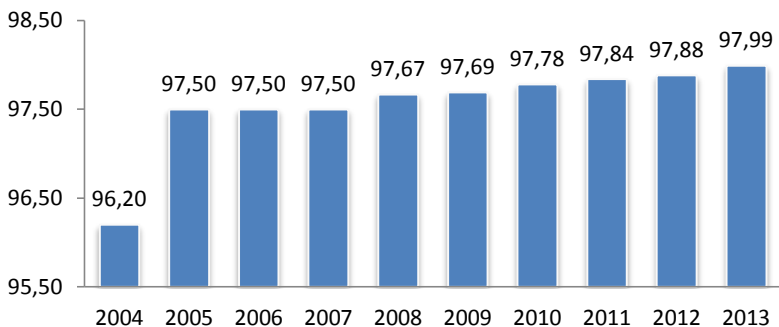
**Gambar 3.5. Angka Harapan Hidup Kalimantan Tengah, 2011-2013**



Indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) merepresentasikan aspek pendidikan pada IPM. Capaian AMH Kalimantan Tengah meningkat dari 96,20 persen pada tahun 2004 meningkat menjadi 97,99 persen pada tahun 2013. Kenaikan AMH ini dapat diartikan sebagai penurunan Angka Buta Huruf. Pada tahun 2004 hingga tahun 2013, penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis menunjukkan kecenderungan meningkat.

Meskipun demikian capaian AMH tersebut masih di bawah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menargetkan AMH di Kalimantan Tengah sebesar 99,80 persen. Diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan AMH penduduk Kalimantan Tengah sebesar 1,81 persen dalam jangka waktu dua tahun.

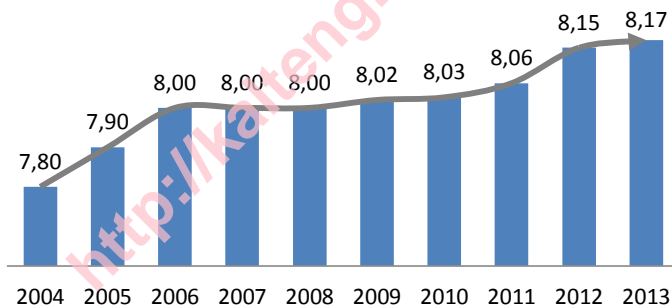
**Gambar 3.6. Angka Melek Huruf Kalimantan Tengah, 2004 - 2013**



Komponen lainnya yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Scholling/MYS*). *MYS* Kalimantan

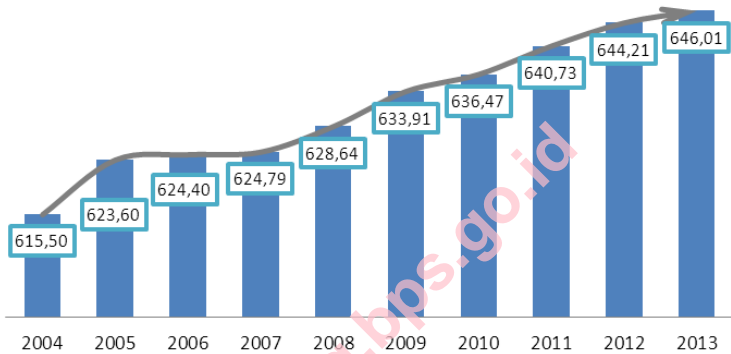
Tengah terus meningkat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 meskipun peningkatannya relatif lambat. Rata-rata penduduk Kalimantan Tengah hanya menamatkan pendidikannya sampai kelas 2 SMP. Kondisi ini relatif sama selama sepuluh tahun terakhir. Padahal pemerintah telah menargetkat rata-rata lama sekolah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sebesar 9,10. Tahun 2015, diharapkan penduduk Kalimantan Tengah telah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

**Gambar 3.7. Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Tengah, 2004-2013**



Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah dimensi ekonomi yaitu kemampuan hidup layak. Komponen ini digambarkan dengan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah. Selama periode 10 tahun (2004-2013), pengeluaran perkapita disesuaikan Kalimantan Tengah meningkat sebesar 30,51 ribu rupiah.

**Gambar 3.8. Pengeluaran perkapita per Tahun Disesuaikan (PPP) Kalimantan Tengah (dalam ribu rupiah), 2004-2013**



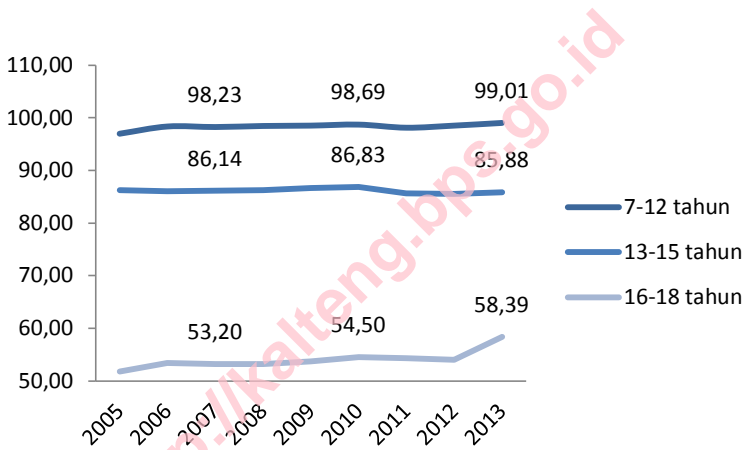
### 3.3 Perkembangan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian

Pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada komponen penyusun IPM. Namun juga pada indikator lain yang berpengaruh terhadap komponen IPM. Pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi erat kaitannya dengan pembangunan manusia. Karena ketiga aspek tersebut merupakan dasar dalam pembangunan manusia.

Pembangunan di bidang pendidikan akan turut serta meningkatkan capaian dalam hal pembangunan manusia. Pemerintah telah mengupayakan berbagai program di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah mencetuskan Kalteng Harati. Kalteng Harati merupakan sebuah konsep dalam mempercepat pencapaian tujuan dan misi pembangunan dan pendidikan di Kalimantan Tengah, dengan mengedepankan 5

prioritas, yakni (1) Kesejahteraan guru; (2) Pendidikan dan pelatihan guru; (3) Beasiswa untuk siswa berprestasi; (4) Penyediaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran; dan (5) Meningkatkan kualitas mutu belajar mengajar.

**Gambar 3.9. Angka Partisipasi Sekolah Kalimantan Tengah, 2005-2013**

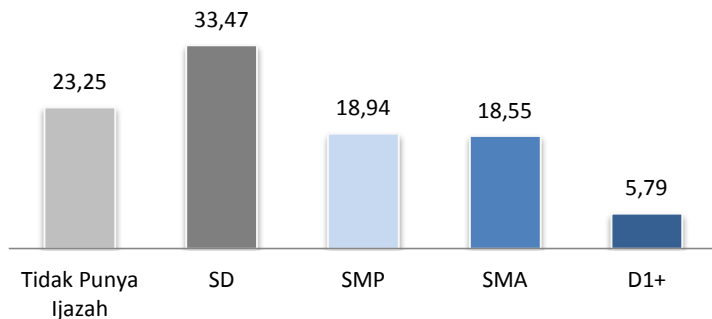


Untuk mengukur akses terhadap pendidikan dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Data tahun 2013 menunjukkan bahwa sebesar 99,01 persen penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) di Kalimantan Tengah sedang menempuh pendidikannya. APS ini sudah cukup baik karena hampir seluruh penduduk usia sekolah dasar di Kalimantan Tengah sedang bersekolah. Namun APS penduduk kelompok usia jenjang pendidikan di atasnya, yakni kelompok usia 13-15 tahun, usia sekolah SMP dan sederajatnya di Kalimantan Tengah pada tahun 2013 mencapai 85,88 persen. Sementara APS penduduk kelompok usia jenjang SMA dan

sederajatnya, yakni kelompok umur 16-18 tahun, di Kalimantan Tengah pada tahun 2013 baru mencapai 58,39 persen.

Pengelompokan penduduk menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan di Kalimantan Tengah tahun 2013 menunjukkan gambaran yang kurang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah masih cukup tinggi yakni sebesar 23,25 persen. Sementara penduduk yang berpendidikan SD sederajat mencapai 33,47 persen, SMP sederajat mencapai 18,94 persen, SMA sederajat mencapai 18,55 persen dan berpendidikan D1 ke atas hanya sebesar 5,79 persen. Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil persentase penduduk yang menamatkan tingkat tersebut. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan tinggi dalam angkatan kerjanya.

**Gambar 3.10. Penduduk Kalimantan Tengah menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki (dalam persen), 2013**



Merujuk pada angka-angka tersebut, diperlukan perhatian khusus mendorong penduduk Kalimantan Tengah menempuh

pendidikan sampai di jenjang menengah dan lanjut. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi sekolah mulai menurun secara signifikan seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Keberadaan fasilitas pendidikan di tingkat kabupaten masih belum merata. Dorongan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap penduduknya agar mau menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dapat diberikan melalui kebijakan sekolah gratis, beasiswa, dan bantuan siswa kurang mampu hingga mencapai jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu upaya membangun fasilitas pendidikan yang lebih merata juga masih diperlukan. Peningkatan pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi yang akan dirasakan manfaatnya di masa yang akan mendatang.

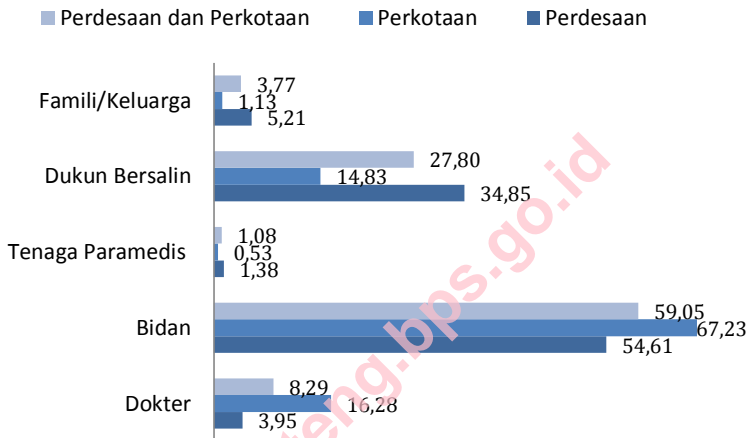
Berbagai indikator kinerja pembangunan kesehatan secara umum menunjukkan status kesehatan yang kian membaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, status gizi masyarakat yang membaik, dan menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk. Status kesehatan penduduk diukur melalui berbagai cara, baik langsung maupun tidak. Umumnya indikator tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui estimasi tertentu, karena informasinya susah diperoleh. Sebagai contoh data kelahiran maupun data kematian masih sulit diperoleh, karena sifat kejadiannya yang insidental dan tersebar di masyarakat, di samping itu sistem registrasi masih belum berjalan di negara ini.



Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur aspek kesehatan dalam penghitungan IPM adalah data Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan hasil estimasi. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Jika penduduk mempunyai derajat kesehatan yang baik, maka nilai Angka Harapan Hidupnya akan cenderung tinggi. Angka Harapan Hidup (AHH) erat kaitannya dengan indikator Angka Kematian Bayi. Tinggi rendahnya indikator Angka Kematian Bayi dipengaruhi oleh indikator lainnya, seperti status kesehatan ibu maupun persalinan oleh tenaga medis. Berdasarkan data SUSENAS di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa lebih dari seperempat dari persalinan balita masih ditolong oleh dukun bersalin, hal ini berarti bahwa masih cukup banyak persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga medis.

Dari hasil SUSENAS juga menunjukkan bahwa penduduk di perdesaan masih mengalami kesulitan dalam akses sarana prasana kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase kelahiran balita yang ditolong oleh tenaga non medis dibandingkan penduduk di perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari segi penolong persalinan, masih terdapat kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dimana persentase persalinan dengan tenaga medis di perdesaan masih lebih rendah. Kualitas tenaga kesehatan juga semestinya ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan tenaga kesehatan pun bisa dibangun.

**Gambar 3.1 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Tempat Tinggal, 2013**



Jumlah fasilitas kesehatan di Kalimantan Tengah pada tahun 2013 terdapat sebanyak 18 rumah sakit umum, 196 puskesmas, 1.041 puskesmas pembantu dan 486 polindes/poskesdes/rumah bersalin. Sedangkan dari jumlah tenaga kesehatan di Kalimantan Tengah pada tahun 2013 baru tersedia 564 dokter umum, 1.885 bidan, 3.928 perawat, 322 apoteker, dan 161 tenaga teknis. Dengan jumlah ini maka pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan dengan alat kesehatan yang memadai dan penambahan tenaga kesehatan (khususnya dokter dan bidan). Penyediaan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai merupakan salah satu tugas pemerintah dalam rangka menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Kondisi kesehatan juga berhubungan erat dengan kondisi sanitasi di lingkungan perumahan tempat tinggal. Penilaian kriteria

'rumah sehat' mengacu pada beberapa kriteria yang ada dalam Kepmenkes RI No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Berdasarkan kriteria dari Kemenkes kriteria 'rumah sehat' antara lain atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup dan tidak padat huni (lebih sama dengan 8m<sup>2</sup>/orang). Selain kriteria tersebut, beberapa kriteria lainnya juga berpengaruh terhadap kriteria 'rumah sehat', seperti penggunaan air minum, sanitasi, penggunaan bahan bakar memasak dan lain-lain.

Berdasarkan data yang dihimpun BPS pada tahun 2013, tercatat bahwa masih ada rumah tangga yang lantainya masih tanah sebesar 65,53 persen dan dindingnya bukan tembok sebesar 75,34 persen. Sementara dari jenis bahan bakar memasak, dikategorikan baik bila menggunakan jenis gas, minyak tanah, dan listrik. Dari data Susenas tercatat masih terdapat sekitar 47,67 persen yang menggunakan bahan bakar selain gas, minyak tanah, dan listrik. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius karena lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat akan menghambat untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduknya.

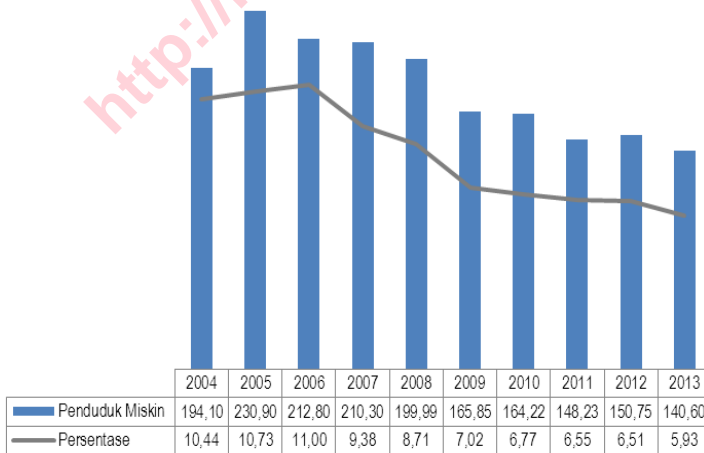
Pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi erat kaitannya. Manusia merupakan salah satu modal dalam proses pembangunan ekonomi. Dan untuk membangun manusia tersebut didukung oleh berbagai factor salah satunya dalam hal ekonomi.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam pembangunann yang berdampak multidimensi. Kemiskinan

menyebabkan seseorang memiliki akses terbatas dalam hal kesehatan maupu pendidikan. Padahal kedua dimensi tersebut merupakan dimensi pokok dalam pembangunan manusia.

Selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, kemiskinan cenderung menunjukkan penurunan. Jumlah penduduk miskin dari 194,10 ribu pada tahun 2004 menjadi 140,60 ribu pada tahun 2013. Sementara dari persentase penduduk miskin menurun dari 10,44 persen pada tahun 2004 menjadi 5,93 persen pada tahun 2013. Penurunan tersebut merupakan indikasi positif bagi perkembangan perekonomian Kalimantan Tengah yang mendorong pembangunan manusia.

**Gambar 3.2. Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Tengah, 2004-2013**



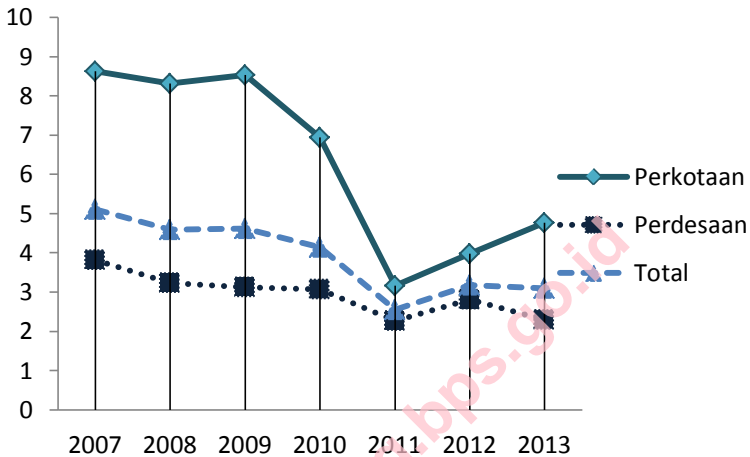
Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin yang tinggal di perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk yang tinggal di perkotaan.

Jumlah penduduk miskin di perdesaan hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Tahun 2013, jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 106,48 ribu (6,75 persen) sementara penduduk miskin di perkotaan mencapai 34,11 ribu (4,30 persen).

Di samping masalah kemiskinan, masalah pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian. Dari tahun 2007 hingga tahun 2013, jumlah pengangguran menurun dari 52.015 pada tahun 2007 menjadi 33.916 pada tahun 2013. Dari grafik di bawah terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menunjukkan trend penurunan, baik TPT di perdesaan, perkotaan maupun total. TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan. Penurunan TPT tertinggi terjadi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

Pada tahun 2013, dari 33.916 orang yang menganggur sekitar 82,36 persen berpendidikan di bawah SMA atau sederajat. Sementara pengangguran yang berpendidikan diploma atau sarjana mencapai 17,64 persen. Hal ini cukup disayangkan bahwa ternyata cukup banyak pengangguran terdidik. Ternyata pendidikan tinggi tidak selamanya menjamin akan mendapat pekerjaan.

**Gambar 3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Tengah, 2007-2013**



### 3.4 Capaian Pembangunan Manusia Tingkat Kabupaten/Kota

Setiap wilayah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam. Keberagaman potensi tersebut menyebabkan capaian pembangunan yang berbeda pada setiap wilayah. Keberhasilan program pembangunan yang diselenggarakan oleh setiap pemerintah daerah juga mempengaruhi capaian pembangunan manusia.

Secara umum pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menunjukkan pola yang sama dengan capaian pembangunan manusia pada level provinsi. Angka IPM pada tiap kabupaten/kota selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung meningkat. Meskipun jika diperhatikan, terjadi variasi kenaikan atau penurunan pada beberapa kabupaten/kota.

**Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Peringkat Menurut Kabupaten/Kota, 2004, 2007, 2010 dan 2013**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Peringkat			
	2004	2007	2010	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	71,29 (4)	72,14 (7)	73,79 (4)	75,11 (4)
Kotawaringin Timur	71,49 (3)	72,90 (3)	74,34 (3)	75,40 (3)
Kapuas	70,80 (6)	72,58 (4)	73,60 (5)	74,48 (6)
Barito Selatan	70,61 (7)	72,56 (5)	73,60 (6)	74,54 (5)
Barito Utara	72,56 (2)	74,12 (2)	75,15 (2)	76,13 (2)
Sukamara	69,13 (13)	70,65 (13)	71,98 (13)	73,24 (13)
Lamandau	69,43 (12)	71,54 (12)	72,32 (12)	73,29 (12)
Seruyan	70,39 (3)	71,62 (10)	72,55 (11)	73,36 (11)
Katingan	70,36 (9)	71,59 (11)	72,65 (10)	73,83 (10)
Pulang Pisau	68,48 (14)	70,10 (14)	71,53 (14)	73,18 (14)
Gunung Mas	71,12 (5)	72,40 (6)	73,43 (7)	74,26 (7)
Barito Timur	69,78 (10)	71,66 (8)	73,00 (8)	73,86 (9)
Murung Raya	69,89 (11)	71,62 (9)	72,84 (9)	73,98 (8)
Palangka Raya	76,46 (1)	77,47 (1)	78,30 (1)	79,52 (1)
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>71,73 (6)</b>	<b>73,49 (7)</b>	<b>74,64 (7)</b>	<b>75,68 (7)</b>

*Keterangan : (...) peringkat*

Sejak berlangsungnya era otonomi daerah, Kalimantan Tengah telah melakukan pemekaran kabupaten/kota. Bidang-bidang pembangunan dan layanan publik yang erat terkait dan merupakan variabel kunci penentu indeks pembangunan manusia merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Upaya-upaya perbaikan dan akselerasi mencapai untuk mencapai indeks pembangunan manusia sangat bergantung pada kinerja pemerintah kabupaten/kota.

Kota Palangka Raya tercatat sebagai daerah dengan capaian IPM tertinggi. Dari tahun 2004 hingga tahun 2013, capaian IPM Palangka Raya selalu yang tertinggi diantara daerah lainnya. Fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Palangka Raya relatif lebih berkembang daripada daerah lainnya. Faktor tersebut membuat Palangka Raya lebih unggul dibandingkan daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Sehingga capaian pembangunan manusia di Palangka Raya lebih tinggi diantara daerah lainnya.

Untuk peringkat 6 besar dalam capaian IPM dari tahun 2004 - 2013 masih didominasi oleh kabupaten-kabupaten induk. Kabupaten Barito Utara dan Kotawaringin Timur bertahan di peringkat ke-2 dan ke-3 selama sepuluh tahun terakhir. Peringkat ke-4 juga masih ditempati oleh Kabupaten Kotawaringin Barat, meskipun pada tahun 2007 Kotawaringin Barat sempat turun ke peringkat ke-7. Peringkat selanjutnya ditempati oleh Kabupaten Barito Selatan dan Kapuas.

Sementara itu, untuk kabupaten pemekaran yang pencapaian pembangunan manusianya relatif lebih tinggi diantara kabupaten pemekaran lainnya adalah Kabupaten Gunung Mas. Capaian IPM Kabupaten Gunung Mas merupakan yang tertinggi di antara kabupaten pemekaran lainnya. Bahkan pada tahun 2004, IPM Gunung Mas mencapai 71,12 yang menempatkannya di peringkat ke-5 diantara kabupaten/kota lainnya.

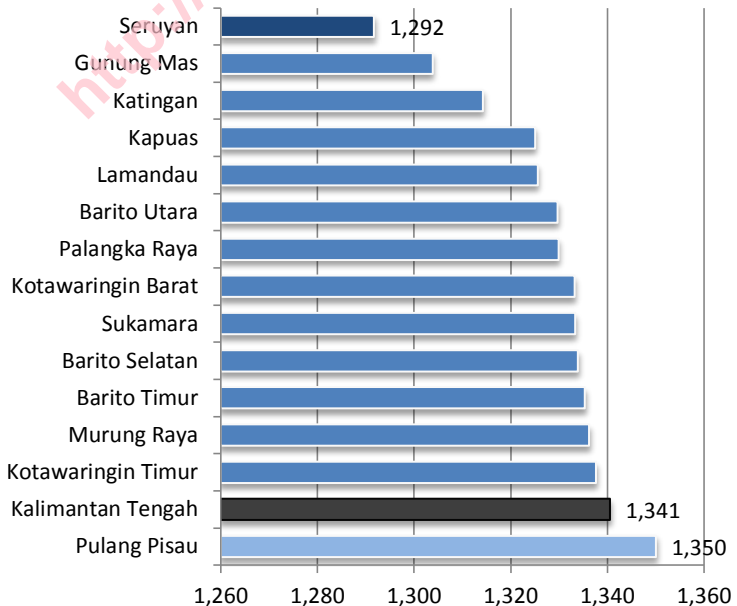
Kabupaten pemekaran lainnya seperti Lamandau, Seruyan, Sukamara dan Pulang Pisau merupakan kabupaten di posisi 4 terbawah dalam capaian IPM. Masih terbatasnya akses atau sarana



prasana di daerah tersebut ditengarai merupakan salah satu faktor rendahnya capaian IPM di daerah tersebut.

Selain dari capaian IPM, keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah juga bisa dilihat dari kecepatan pencapaian IPM menuju nilai ideal yang dilihat dari nilai reduksi *shortfall*. Nilai reduksi *shortfall* selama tahun 2004 sampai 2013 menunjukkan bahwa kecepatan pencapaian IPM kabupaten/kota per tahunnya berkisar antara -5,95 persen sampai 8,03 persen. Setiap tahunnya, pembangunan manusia pada level kabupaten/kota mengalami perubahan yang berfluktuatif sehingga capaian IPM yang dihasilkan pun beragam.

**Gambar 3.4. Rata-rata Reduksi *Shortfall* Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2004 – 2013**



Dalam hal kecepatan pencapaian IPM menuju posisi ideal selama sepuluh tahun terakhir, Pulang Pisau relatif paling cepat dibandingkan kabupaten/kota lainnya untuk menuju nilai ideal. Meskipun IPM Pulang Pisau masih yang terbawah dibanding kabupaten lainnya, namun usaha Pemerintah Daerah nya untuk meningkatkan capaian pembangunan manusianya berbuah positif. Selama kurun waktu sepuluh tahun tersebut IPM Pulang Pisau meningkat cukup pesat dari 68,48 menjadi 73,18.

Pencapaian pembangunan manusia di Seruyan relatif paling lambat dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Selama sepuluh tahun terakhir, IPM Seruyan meningkat dari 70,39 pada tahun 2004 menjadi 73,36 pada tahun 2013. Yang artinya selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata kecepatan untuk mencapai nilai IPM ideal sebesar 1,292 persen. Dengan IPM yang relatif rendah tersebut, peringkat IPM pun menurun selama sepuluh tahun terakhir.

# **DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH**

 ***Disparitas IPM  
Antarkabupaten/kota***

 ***Disparitas Komponen Penyusun  
IPM Antarkabupaten/kota***

<http://kalteng.bps.go.id>



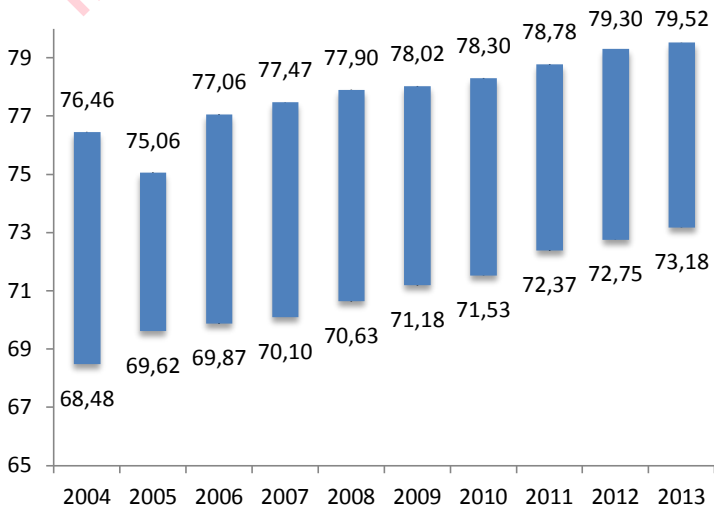
# BAB IV

## DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ANTAR WILAYAH

### 4.1 Disparitas IPM Antarkabupaten/kota

Dalam pelaksanaan pembangunan yang telah berlangsung seringkali memunculkan berbagai permasalahan. Pembangunan yang belum merata masih merupakan masalah klasik yang dihadapi. Tidak terkecuali pembangunan manusianya, ketimpangan capaian pembangunan manusia masih nampak. Kesenjangan antara wilayah Jawa dan luar Jawa atau wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur pun masih terlihat. Meskipun secara umum ada kecenderungan bahwa disparitasnya semakin mengecil.

**Gambar 4.1.** IPM Terendah dan Tertinggi yang Dicapai Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2004-2013



Dari tahun 2004-2013, capaian pembangunan manusia di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah terus menunjukkan peningkatan. Namun di balik peningkatan IPM tersebut tidak terlepas dari masalah kesenjangan. Tiap kabupaten/kota mempunyai kemampuan dan kecepatan yang berbeda-beda dalam pembangunan manusianya, sehingga capaian IPM tiap kabupaten/kota pun bervariasi.

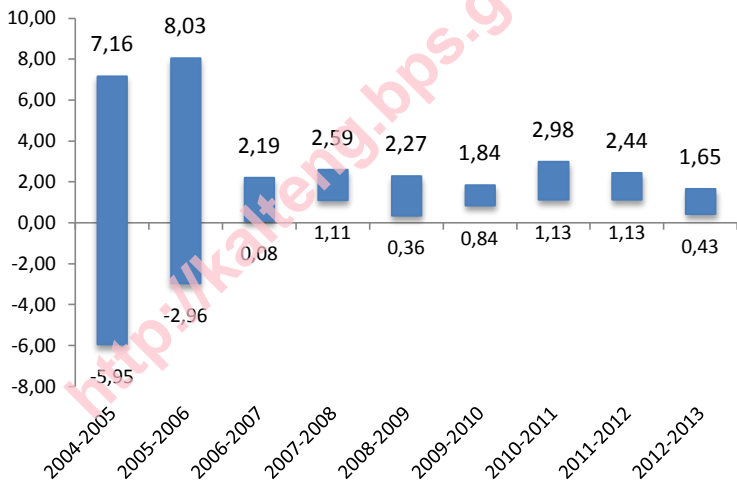
Tahun 2013 IPM Kalimantan Tengah yang mencapai 75,68, namun di balik capaian tersebut terdapat variasi capaian antardaerah. Peningkatan capaian IPM dari tahun 2004 hingga tahun 2013 juga dibarengi dengan kesenjangan. Ketimpangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah pada tahun 2013 mencapai 6,38 persen. Ketimpangan tersebut terjadi akibat perbedaan IPM yang dicapai Palangka Raya (79,52) dan Pulang Pisau (73,18).

Namun demikian ketimpangan tersebut relatif menyempit dibandingkan kondisi pada tahun 2004. Tahun 2004, ketimpangan pencapaian pembangunan manusia antar daerah mencapai 8,03 persen. Selama kurun waktu hampir satu dasawarsa, disparitas pembangunan manusia berkurang sebesar 1,63 persen dari 7,98 persen (tahun 2004) menjadi 6,34 persen (tahun 2013).

Kesenjangan capaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari kecepatan tiap kabupaten/kota dalam mencapai pembangunan manusia yang ideal. Gambar 4.2 menunjukkan variasi kecepatan tiap kabupaten/kota dalam mencapai IPM ideal per tahunnya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa *range* reduksi

*shortfall* semakin menurun tiap tahunnya. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kecepatan pembangunan manusia menuju ideal semakin seragam antarkabupaten/kota. Kabupaten Pulang Pisau dan Seruyan menjadi kabupaten dengan reduksi *shortfall* tertinggi dan terendah dalam kurun waktu 2004-2013.

**Gambar 4.2. Disparitas Reduksi *Shortfall* Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2004-2013**



#### 4.2 Disparitas Komponen Penyusun IPM Antarkabupaten/kota

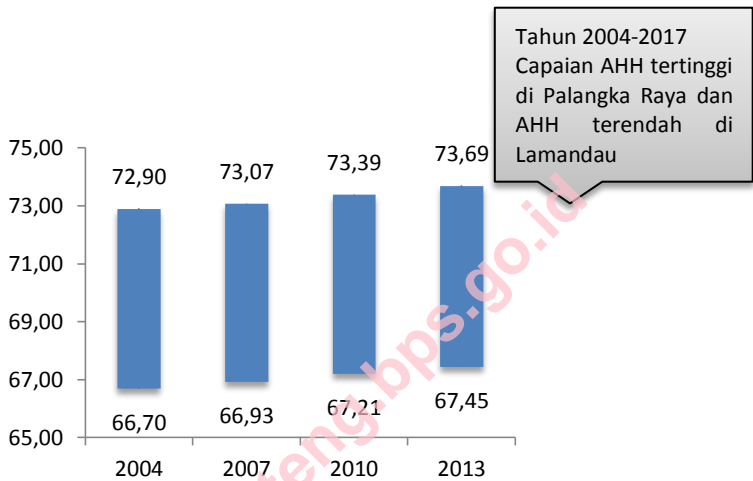
Pembangunan manusia yang dicapai oleh suatu daerah tidak terlepas dari peran masing-masing komponennya. Ketimpangan pencapaian IPM juga menjadi indikasi terjadinya ketimpangan pada komponen penyusun IPM. Pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi yang belum merata turut mempengaruhi kesenjangan capaian pembangunan manusia.

Kesehatan merupakan faktor penting pembangunan manusia dan menjadi dasar bagi pembangunan bidang lainnya. Manusia yang sehat merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*). Oleh karena itu, pembangunan di bidang kesehatan sudah seharusnya menjadi pusat perhatian pemerintah. Peningkatan dan pemerataan derajat kesehatan manusia merupakan tujuan dari pembangunan manusia di bidang kesehatan. Namun rupanya hal tersebut masih menjadi persoalan di daerah. Pembangunan yang belum merata, termasuk pembangunan di aspek kesehatan.

Pada indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang merepresentasikan aspek umur panjang dan sehat, terlihat adanya kesenjangan. Rentang capaian pada tahun 2004 tercatat sebesar 6,20 poin. Sedangkan tahun 2013 perbedaan capaian AHH tersebut meningkat menjadi 6,24 poin. Dari tahun ke tahun, rentang capaian AHH tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kabupaten Lamandau merupakan daerah dengan pencapaian AHH terendah dan Kota Palangka Raya sebagai daerah dengan pencapaian AHH tertinggi.



**Gambar 4.3. Disparitas Angka Harapan Hidup Antarkabupaten di Kalimantan Tengah, 2004, 2017, 2010 dan 2013**



Rentang capaian yang hampir tidak mengalami perubahan selama tahun 2004 hingga 2013 dapat mengindikasikan bahwa pemerataan kesehatan pun hampir tidak mengalami perubahan. Ketersediaan fasilitas kesehatan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang merata di tiap kabupaten/kota sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan di bidang kesehatan. Fasilitas kesehatan yang lengkap seringkali tidak tersedia di semua kabupaten/kota. Permasalahan lain yang terkadang menghambat dalam pemerataan kesehatan adalah masih terbatasnya sumberdaya manusia di bidang kesehatan dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Selain upaya dari pemerintah, peran serta masyarakat juga sangat berperan dalam meningkatkan dan mewujudkan pemerataan kesehatan.

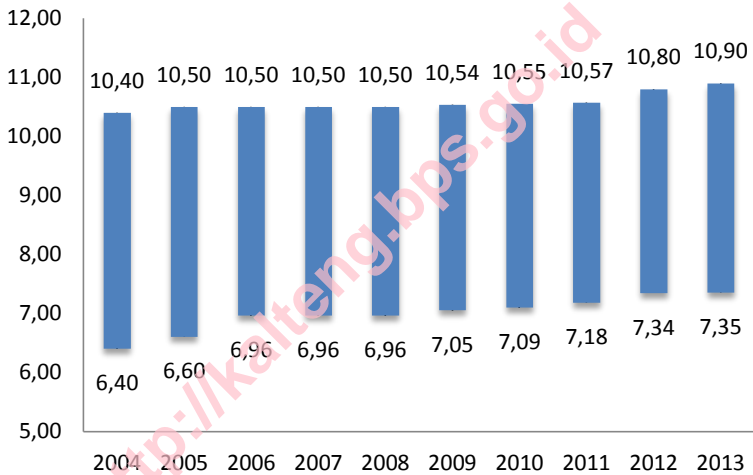
Pendidikan memegang peran penting dalam pembangunan manusia maupun pembangunan dalam bidang lainnya. Dengan demikian menjadi suatu keharusan untuk mengatasi permasalahan yang masih terjadi di bidang kesehatan. Permasalahan yang masih melingkupi pendidikan saat ini adalah pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Permasalahan ini terjadi di semua jenjang pemerintahan, baik level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Pendidikan dalam penghitungan IPM diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator tersebut juga menggambarkan adanya kesenjangan antardaerah di Kalimantan Tengah. Tingkat pencapaian rata-rata lama sekolah untuk tiap kabupaten juga cukup bervariasi. Kesenjangan rata-rata lama sekolah antara tahun 2004-2013 berkisar antara 3 sampai 4 tahun. Tahun 2004 perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antarkabupaten mencapai 4 tahun. Dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kesenjangan capaian rata-rata lama sekolah.

Kota Palangka Raya yang merupakan ibu kota Kalimantan Tengah dengan sarana pendidikan yang relatif lebih memadai, memiliki rata-rata lama sekolah yang tertinggi di antara kabupaten lainnya selama sepuluh tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Palangka Raya sekitar 10 tahun. Sebagian besar penduduk di Palangka Raya menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah pertama.

Sementara di kabupaten dengan capaian terendah, sebagian besar hanya menamatkan pendidikan sampai jenjang sekolah dasar.

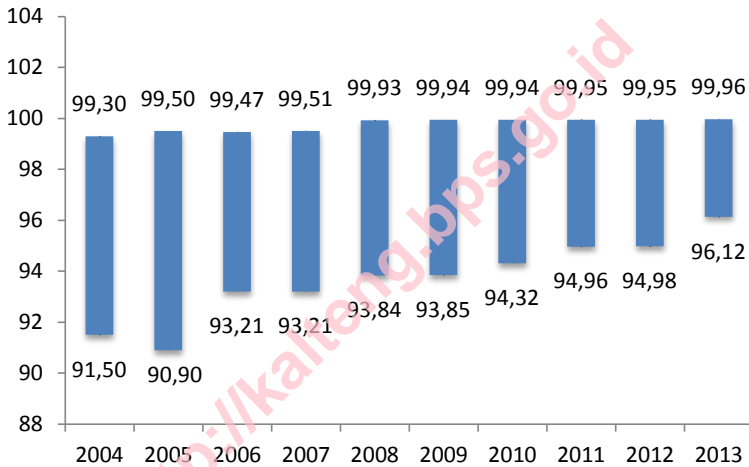
**Gambar 4.4. Disparitas Rata-rata Lama Sekolah Antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah, 2004-2013**



Pada komponen Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan adanya kesenjangan antarkabupaten/kota sebesar 7,80 persen (tahun 2004), kemudian menurun menjadi 3,84 persen (tahun 2013). Sekilas terlihat bahwa capaian AMH untuk tiap kabupaten/kota semakin merata. Hal ini terlihat dari semakin mengecilnya *range* capaian AMH antarkabupaten. Secara umum kemampuan baca tulis penduduk Kalimantan Tengah sudah lebih baik. Namun demikian rata-rata lama sekolah yang masih rendah, sebagian besar tidak sampai menamatkan wajib belajar 9 tahun. Kondisi tersebut menyiratkan bahwa akses pada pendidikan jenjang

menengah maupun lanjutan perlu ditingkatkan di semua kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

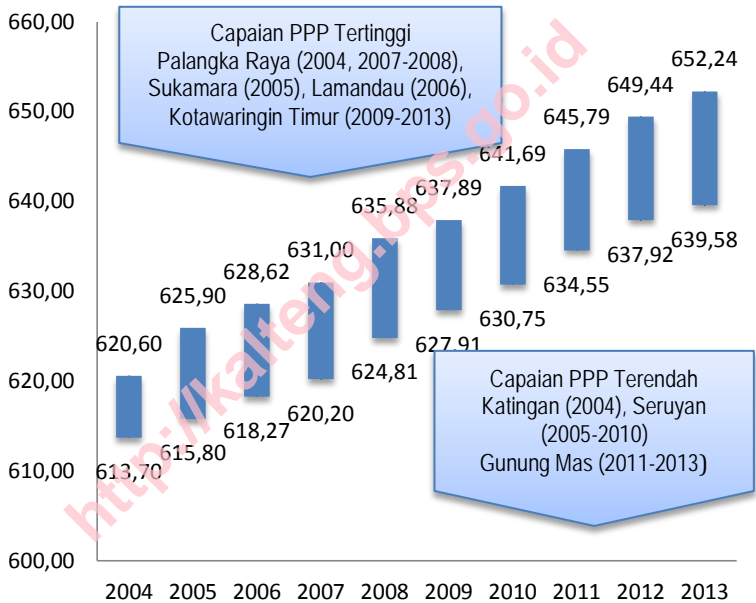
**Gambar 4.5. Disparitas Angka Melek Huruf (AMH) Antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah, 2004-2013**



Ketimpangan ekonomi masyarakat antarkabupaten/kota dilihat dari besarnya perbedaan indikator pengeluaran perkapita antarkabupaten. Perekonomian tiap daerah yang senantiasa berubah-ubah mengakibatkan pengeluaran perkapita berbeda-beda. Pencapaian pengeluaran perkapita antara Kotawaringin Timur (652,24 ribu) dan Gunung Mas (639,58 ribu) mengakibatkan rentang pengeluaran perkapita sebesar 12,67 ribu pada tahun 2013. Berbeda dengan kondisi komponen penyusun IPM lainnya yang cenderung mengalami penyempitan rentang, dimensi standar hidup justru menampakkan rentang antarkabupaten yang semakin melebar. Hal tersebut patut menjadi perhatian pemerintah untuk

menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kalimantan Tengah.

**Gambar 4.6 Disparitas Pengeluaran Perkapita Antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah, 2004-2013**





<http://kalteng.bps.go.id>

## **KESIMPULAN**





## BAB V

### KESIMPULAN

Antara tahun 2004-2013, capaian pembangunan manusia Kalimantan Tengah cenderung mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,73 pada tahun 2004 menjadi 75,68 pada tahun 2013. Selama kurun waktu sepuluh tahun IPM naik sebesar 3,95 poin. Reduksi *shortfall* tiap tahunnya menunjukkan *trend* penurunan. Hal ini mengindikasikan kecepatan Kalimantan Tengah untuk mencapai pembangunan manusia yang ideal semakin menurun. Di samping itu ada beberapa hal yang bisa disimpulkan, yaitu:

1. IPM Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkat selama tahun 2004-2013, namun tidak mengubah status pembangunan manusia yaitu menengah atas. Dan dari sisi peringkat nasional, juga tidak banyak menunjukkan perubahan.
2. Capaian pembangunan manusia untuk tingkat kabupaten/kota juga belum merata dan masih menunjukkan adanya kesenjangan. Tahun 2013 IPM tertinggi dicapai Kota Palangka Raya (79,52) dan IPM terendah diraih Kabupaten Pulang Pisau (73,18). Dari status pembangunan manusia untuk tingkat kabupaten/kota, semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk kategori menengah atas.
3. Meskipun komponen IPM terus meningkat, namun capaiannya masih belum memenuhi target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.
4. Pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota belum merata, masih terjadi ketimpangan dalam capaian pembangunan manusia, maupun komponen penyusunnya.

5. Kesenjangan capaian pembangunan manusia semakin menyempit, demikian pula dengan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan cenderung semakin merata. Namun tidak demikian dengan bidang ekonomi yang justru semakin melebar.

<http://kalteng.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Jakarta : CV. Nario Sari.

-----, 2012. *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011*. Jakarta : BPS

-----, 2013. *Indeks Pembangunan Manusia 2012*. Jakarta : BPS.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Tengah 2013*. Palangka Raya : BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

-----, 2014. *Kalimantan Tengah dalam Angka 2014*. Palangka Raya : BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

-----, 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah 2009-2013*. Palangka Raya : BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

-----, 2014. *Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah 2013*. Palangka Raya : BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

Bappenas, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan UNDP. 2010. *Pembangunan Provinsi Gorontalo: Perencanaan dengan Indeks Pembangunan Manusia*.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.depkes.go.id>

<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id>



## LAMPIRAN

<http://kalleng.bps.go.id>



Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2004-2013

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kotawaringin Barat	71,29	71,66	71,95	72,14	72,86	73,30	73,79	74,19	74,69	75,11	
Kotawaringin Timur	71,49	72,48	72,70	72,90	73,36	73,97	74,34	74,74	75,14	75,40	
Kapuas	70,80	71,85	72,23	72,58	72,89	73,22	73,60	74,00	74,33	74,48	
Barito Selatan	70,61	71,34	72,40	72,56	72,96	73,29	73,60	74,01	74,34	74,54	
Barito Utara	72,56	72,09	73,94	74,12	74,57	74,85	75,15	75,50	75,97	76,13	
Sukamara	69,13	69,94	70,45	70,65	71,00	71,62	71,98	72,42	72,88	73,24	
Lamandau	69,43	71,32	70,90	71,54	71,98	72,08	72,32	72,74	73,13	73,29	
Seruyan	70,39	70,94	71,44	71,62	72,00	72,28	72,55	72,93	73,24	73,36	
Katingan	70,36	69,62	71,54	71,59	72,06	72,33	72,65	73,32	73,67	73,83	
Pulang Pisau	68,48	70,74	69,87	70,10	70,63	71,18	71,53	72,37	72,75	73,18	
Gunung Mas	71,12	70,71	72,27	72,40	72,85	73,13	73,43	73,73	74,08	74,26	
Barito Timur	69,78	71,11	71,57	71,66	72,17	72,72	73,00	73,33	73,75	73,86	
Murung Raya	69,89	71,05	71,60	71,62	72,18	72,46	72,84	73,34	73,77	73,98	
Palangka Raya	76,46	75,06	77,06	77,47	77,90	78,02	78,30	78,78	79,30	79,52	
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>71,73</b>	<b>73,21</b>	<b>73,40</b>	<b>73,49</b>	<b>73,88</b>	<b>74,36</b>	<b>74,64</b>	<b>75,06</b>	<b>75,46</b>	<b>75,68</b>	

Lampiran 2. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota, 2004-2013

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (AHH)										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kotawaringin Barat	70,80	70,90	70,90	71,05	71,18	71,32	71,47	71,61	71,75	71,79	
Kotawaringin Timur	68,60	68,90	69,01	69,16	69,29	69,43	69,56	69,70	69,84	69,92	
Kapuas	69,80	70,30	70,30	70,43	70,54	70,66	70,78	70,90	71,02	71,11	
Barito Selatan	67,00	67,50	68,00	68,08	68,14	68,21	68,28	68,35	68,42	68,47	
Barito Utara	71,30	71,30	71,40	71,57	71,72	71,88	72,04	72,20	72,36	72,39	
Sukamara	67,10	67,20	67,60	67,67	67,73	67,79	67,85	67,92	67,98	68,04	
Lamandau	66,70	66,80	66,90	66,93	67,05	67,13	67,21	67,29	67,36	67,45	
Seruyan	66,90	67,20	67,80	67,85	67,90	67,94	67,99	68,04	68,09	68,12	
Katingan	66,70	67,00	67,10	67,18	67,30	67,40	67,50	67,60	67,70	67,72	
Pulang Pisau	66,90	66,90	67,20	67,30	67,38	67,47	67,56	67,65	67,74	67,79	
Gunung Mas	66,80	67,00	67,40	67,55	67,68	67,82	67,96	68,10	68,23	68,28	
Barito Timur	67,30	67,50	67,60	67,67	67,73	67,79	67,85	67,92	67,98	68,00	
Murung Raya	67,00	67,60	67,80	67,83	67,95	68,03	68,11	68,18	68,26	68,28	
Palangka Raya	72,90	72,90	72,95	73,07	73,17	73,28	73,39	73,50	73,61	73,69	
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>69,80</b>	<b>70,70</b>	<b>70,80</b>	<b>70,90</b>	<b>71,00</b>	<b>71,10</b>	<b>71,20</b>	<b>71,30</b>	<b>71,41</b>	<b>71,47</b>	



Lampiran 3. Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kabupaten/Kota, 2004-2013

Kabupaten/ Kota	Angka Melek Huruf (AMH)										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kotawaringin Barat	92,60	92,80	93,63	93,63	94,09	94,52	94,93	94,96	94,98	96,12	
Kotawaringin Timur	98,40	98,70	98,70	98,70	98,70	98,71	98,72	98,73	98,77	98,78	
Kapuas	93,80	93,90	94,68	95,95	96,13	96,14	97,19	97,21	97,24	97,29	
Barito Selatan	97,50	98,00	98,47	98,95	98,95	98,97	98,97	98,98	98,98	99,28	
Barito Utara	97,60	94,70	98,00	98,10	98,17	98,19	98,20	98,24	98,71	98,72	
Sukamara	94,50	94,40	94,83	95,53	95,53	95,56	95,57	95,59	95,75	96,61	
Lamandau	94,20	99,30	95,84	98,64	98,64	98,65	98,66	98,67	98,68	98,70	
Seruyan	99,00	99,40	99,30	99,30	99,30	99,31	99,31	99,32	99,32	99,33	
Katingan	99,10	91,60	99,40	99,40	99,40	99,41	99,47	99,48	99,49	99,50	
Pulang Pisau	91,50	98,30	93,21	93,21	93,84	93,85	94,32	96,23	96,23	96,56	
Gunung Mas	98,20	94,60	99,30	99,51	99,51	99,53	99,60	99,64	99,64	99,70	
Barito Timur	94,20	99,30	97,26	97,45	97,95	97,97	97,98	98,00	98,01	98,03	
Murung Raya	99,30	99,50	99,30	99,30	99,93	99,94	99,94	99,95	99,95	99,96	
Palangka Raya	99,30	90,90	99,47	99,47	99,47	99,48	99,48	99,51	99,53	99,55	
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>96,20</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,67</b>	<b>97,69</b>	<b>97,78</b>	<b>97,84</b>	<b>97,88</b>	<b>97,99</b>	

Lampiran 4. Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Kabupaten Menurut Kabupaten/Kota, 2004-2013

Kabupaten/ Kota	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kotawaringin Barat	7,40	7,60	7,60	7,60	7,60	7,62	7,71	7,74	7,97	7,99	
Kotawaringin Timur	7,80	8,00	8,00	8,00	8,00	8,03	8,03	8,04	8,08	8,08	
Kapuas	7,20	7,30	7,30	7,30	7,30	7,32	7,32	7,34	7,34	7,35	
Barito Selatan	7,90	8,00	8,35	8,35	8,35	8,36	8,43	8,45	8,47	8,48	
Barito Utara	7,30	7,50	8,37	8,37	8,37	8,38	8,38	8,39	8,40	8,41	
Sukamara	6,60	6,80	7,02	7,02	7,02	7,05	7,09	7,18	7,47	7,62	
Lamandau	7,50	7,60	7,60	7,60	7,60	7,61	7,63	7,73	7,83	7,84	
Seruyan	7,50	7,70	7,70	7,70	7,70	7,72	7,76	7,77	7,78	7,80	
Katingan	7,60	7,80	7,76	7,76	7,76	7,77	7,99	8,35	8,36	8,45	
Pulang Pisau	6,90	7,00	7,00	7,22	7,22	7,23	7,31	7,65	7,67	7,93	
Gunung Mas	8,40	8,40	8,68	8,68	8,68	8,70	8,75	8,77	8,79	8,81	
Barito Timur	7,50	7,60	8,44	8,44	8,44	8,50	8,54	8,62	8,83	8,84	
Murung Raya	6,40	6,60	6,96	6,96	6,96	7,12	7,35	7,38	7,52	7,53	
Palangka Raya	10,40	10,50	10,50	10,50	10,50	10,54	10,55	10,57	10,80	10,90	
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>7,80</b>	<b>7,90</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,02</b>	<b>8,03</b>	<b>8,06</b>	<b>8,15</b>	<b>8,17</b>	

Lampiran 5. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) Menurut Kabupaten/Kota, 2004-2013

Kabupaten/ Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP)										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kotawaringin Barat	616,80	618,50	619,80	621,20	628,30	631,60	634,80	638,60	641,80	643,40	
Kotawaringin Timur	614,80	622,70	624,70	626,30	631,30	637,90	641,70	645,80	649,40	652,20	
Kapuas	616,20	624,90	627,60	630,20	633,50	634,50	638,60	641,90	643,00	643,00	
Barito Selatan	616,50	620,00	625,50	625,50	630,30	633,90	636,70	641,40	644,90	646,20	
Barito Utara	616,30	616,60	622,10	622,80	627,40	629,70	632,40	635,60	639,10	640,80	
Sukamara	617,70	625,90	626,30	626,30	630,40	637,60	641,40	645,80	648,10	648,40	
Lamandau	616,70	624,90	628,60	628,60	633,50	634,10	636,40	640,20	643,90	645,10	
Seruyan	613,90	615,80	618,30	620,20	624,80	627,90	630,70	635,20	638,70	639,80	
Katingan	613,70	621,60	623,60	623,70	629,00	631,70	632,80	637,40	640,90	642,00	
Pulang Pisau	616,50	625,20	626,50	626,60	631,10	637,50	639,20	640,70	644,80	646,50	
Gunung Mas	617,70	621,30	622,40	622,40	627,40	629,80	631,90	634,50	637,90	639,60	
Barito Timur	616,90	617,10	620,20	620,20	625,00	631,00	633,90	636,30	639,70	640,90	
Murung Raya	616,40	624,60	627,40	627,50	632,00	633,50	635,60	641,40	645,00	647,50	
Palangka Raya	620,60	625,70	626,60	631,00	635,90	636,40	639,00	644,20	647,90	649,20	
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>615,50</b>	<b>623,60</b>	<b>624,40</b>	<b>624,80</b>	<b>628,60</b>	<b>633,90</b>	<b>636,50</b>	<b>640,70</b>	<b>644,20</b>	<b>646,00</b>	

Lampiran 6. Reduksi *Shortfall* Menurut Kabupaten/Kota, 2004-2013

Kabupaten/ Kota	Reduksi <i>Shortfall</i> (RS)									
	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Kotawaringin Barat	1,32	1,01	0,68	2,59	1,60	1,84	1,52	1,93	1,65	
Kotawaringin Timur	3,47	0,78	0,74	1,71	2,27	1,43	1,55	1,57	1,07	
Kapuas	3,58	1,36	1,27	1,11	1,22	1,42	1,53	1,27	0,58	
Barito Selatan	2,49	3,69	0,57	1,47	1,22	1,14	1,58	1,27	0,77	
Barito Utara	-1,72	6,63	0,68	1,76	1,07	1,19	1,41	1,92	0,68	
Sukamara	2,63	1,69	0,67	1,19	2,13	1,28	1,56	1,67	1,33	
Lamandau	6,20	-1,48	2,19	1,56	0,36	0,84	1,50	1,44	0,62	
Seruyan	1,86	1,71	0,64	1,33	1,01	0,98	1,38	1,13	0,43	
Katungan	-2,51	6,33	0,16	1,67	0,99	1,13	2,48	1,28	0,62	
Pulang Pisau	7,16	-2,96	0,76	1,79	1,87	1,19	2,98	1,37	1,56	
Gunung Mas	-1,43	5,34	0,45	1,65	1,04	1,11	1,13	1,31	0,72	
Barito Timur	4,41	1,58	0,31	1,80	1,98	1,04	1,20	1,56	0,43	
Murung Raya	3,84	1,90	0,08	1,95	1,02	1,36	1,85	1,62	0,80	
Palangka Raya	-5,95	8,03	1,77	1,91	0,57	1,26	2,22	2,44	1,06	
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>5,26</b>	<b>0,70</b>	<b>0,34</b>	<b>1,47</b>	<b>1,84</b>	<b>1,09</b>	<b>1,66</b>	<b>1,62</b>	<b>0,88</b>	

Lampiran 7. Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota, 2004-2013

Kabupaten/ Kota	Peringkat IPM										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kotawaringin Barat	4	5	7	7	6	4	4	4	4	4	4
Kotawaringin Timur	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kapuas	6	4	6	4	5	6	5	6	6	6	6
Barito Selatan	7	6	4	5	4	5	6	5	5	5	5
Barito Utara	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sukamara	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Lamandau	12	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Seruyan	8	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11
Katingan	9	14	10	11	10	10	10	10	10	10	10
Pulang Pisau	14	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Gunung Mas	5	12	5	6	7	7	7	7	7	7	7
Barito Timur	10	8	9	8	9	8	8	9	9	9	9
Murung Raya	11	9	8	9	8	9	9	9	8	8	8
Palangka Raya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Kalimantan Tengah (Peringkat Nasional)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**Lampiran 8. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli PPP**

Komoditi	Unit	Proporsi dari Total Konsumsi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Beras lokal	Kg	7,25
2. Tepung terigu	Kg	0,1
3. Singkong	Kg	0,22
4. Tuna/cakalang	Kg	0,5
5. Teri	Ons	0,32
6. Daging sapi	Kg	0,78
7. Ayam	Kg	0,65
8. Telur	Telur	1,48
9. Susu kental manis	397 gram	0,48
10. Bayam	Kg	0,3
11. Kacang panjang	Kg	0,32
12. Kacang tanah	Kg	0,22
13. Tempe	kg	0,79
14. Jeruk	Kg	0,39
15. Pepaya	Kg	0,18
16. Kelapa	Butir	0,56
17. Gula	Ons	1,61
18. Kopi	Ons	0,6
19. Garam	Ons	0,15
20. Merica	Ons	0,13
21. Mie instan	80 gram	0,79
22. Rokok kretek	10 batang	2,86
23. Listrik	Kwh	2,06
24. Air minum	M <sup>3</sup>	0,46
25. Bensin	Liter	1,02
26. Minyak tanah	Liter	1,74
27. Sewa rumah	Liter	11,56
<b>Total</b>		<b>37,52</b>





# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://kalteng.bps.go.id>



BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Kapt. Piere Tendean No.6, Palangka Raya - 73112

Telp : (0536) 3228105, Fax : (0536)3221380

website : <http://kalteng.bps.go.id>; email : [bps6200@bps.go.id](mailto:bps6200@bps.go.id)